

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan. Kecamatan Medan Tembung dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati atau walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan.

Kecamatan sebagai garis depan dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan Aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah atau Desa bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis

pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Kota. Sebagaimana Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 224 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sbb :

(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah,

(2) Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kemudian dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 selaras dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa kasus yang kurang memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada karakter birokrasi yang belum sesuai harapan diwilayahnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mario Monteiro, Josef. 2016. Pemahaman dasar hukum pemerintahan daerah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

<sup>2</sup> Alther manengkey.2015.peran camat dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. FISIPUnsrat

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, bahwa; Aparatur pemerintah Kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sebagai pelayanan publik. Adapun tugas dari Camat tertuang dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa:

(1) Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Menurut M. Hamdani Pratama (2015;1) bahwa; Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintahan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik kepada masyarakat adalah salah satu tugas atau fungsi penting pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya.

“Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas sebagai berikut: Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat; Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota; Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan; Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat

kecamatan; Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.”<sup>3</sup>

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Camat dibantu Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan seksi-seksi kecamatan. Seksi-seksi yang ada di Kecamatan meliputi: kepala seksi tata pemerintahan; kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum; kepala seksi kesejahteraan sosial; kepala seksi sarana dan prasarana wilayah; dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Camat beserta sekretaris kecamatan dan seksi-seksi berkantor di kantor kecamatan. Di samping itu Camat juga bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Bupati atau Walikota.<sup>4</sup>

Camat sebagai perangkat daerah, Di Kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam hal urusan pelayanan masyarakat. Selain itu, Kecamatan juga akan mengembangkan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Hal ini bukan berarti Camat menjadi bawahan langsung Sekda karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati atau Walikota. Namun, pertanggung jawaban Camat tersebut merupakan pertanggung jawaban administratif.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Walikota Medan No 53 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan

<sup>4</sup> Cahyo mulyo nugrahanto.2017 perbedaan kedudukan dan tugas camat menurut undangundang No.32 tahun 2004 dan undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di kecamatan bergas kabupaten semarang. Jurnal ilmu hukum. Vol 6 no 2

<sup>5</sup> H amudy, Moh. Ilham, 2009. peran camat di era otonomi daerah. Jurnal ilmu administrasi dan organisasi. Vol 16 no 1 hal 53-58

Pengangkatan Camat oleh Bupati/Walikota berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang mengerti tentang pemerintahan dan disumpah terlebih dahulu untuk melaksanakan tugasnya dan dimana sumpah tersebut merupakan seperangkat janji yang harus dipenuhi kepada Bupati/Walikota, masyarakat, diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun kedudukan dan susunan organisasi Kecamatan pada Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan observasi peneliti di Kantor Camat , Kecamatan Medan tembung yang dilakukan pada tanggal 25 mei 2023 penulis menemukan masalah terkait pelayanan publik. Masalah terkait pelayanan publik tersebut yaitu mengenai faktor- factor penghambat implementasi tugas pokok dan fungsi kecamatan, sebagai contoh Kualitas infrastruktur, Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan rusak, sistem drainase yang buruk, dan sarana transportasi yang kurang memadai, dapat menjadi permasalahan di kecamatan ini. Hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas ternyata banyak permasalahan yang di dapatkan, untuk itu penulis berusaha untuk mengungkapkan apa adanya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan (Studi Deskripsi Kualitatif Di Kecamatan Medan Tembung) Kota Medan**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah di paparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Tembung?
2. Apa faktor-faktor pendukung implementasi Tugas dan Fungsi Kecamatan Medan Tembung?
3. Apa faktor-faktor penghambat implementasi Tugas dan Fungsi Kecamatan Medan Tembung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di susun tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Medan Tembung

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Medan Tembung
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Medan Tembung

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

##### b. Manfaat Praktis

###### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara untuk mempersiapkan diri terjun ke dalam dunia masyarakat. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

###### 2. Bagi Kecamatan Medan Tembung

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam implementasi tugas pokok dan fungsi kecamatan.

### 3. Bagi Fisip UISU

Untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara pada umumnya.

## **E. Kerangka Teori**

Dalam sebuah penelitian , teori sangat diperlukan ,dengan adanya sebuah teori maka dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang ada didalam penelitian ini.

Pada penelitian ini mencoba membahas tentang Model Teori Van Meter dan Van Horn dan juga Teori Peraturan Walikota Medan No 53 Tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi Kecamatan atau kelurahan serta Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli.

### **1. Model Teori Van Meter dan Van Horn**

Menurut Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda. Implementasi tergantung pada faktor-faktor lingkungan, seperti sumber daya, dukungan politik, dan keterlibatan masyarakat, serta faktor internal, seperti ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi organisasi. Teori



implementasi mereka mencakup tiga dimensi penting, yaitu peran dari pelaku, struktur organisasi, dan lingkungan yang memengaruhi implementasi kebijakan.<sup>6</sup>

Dalam konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975, kinerja kebijakan diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta sejauh mana implementasi kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

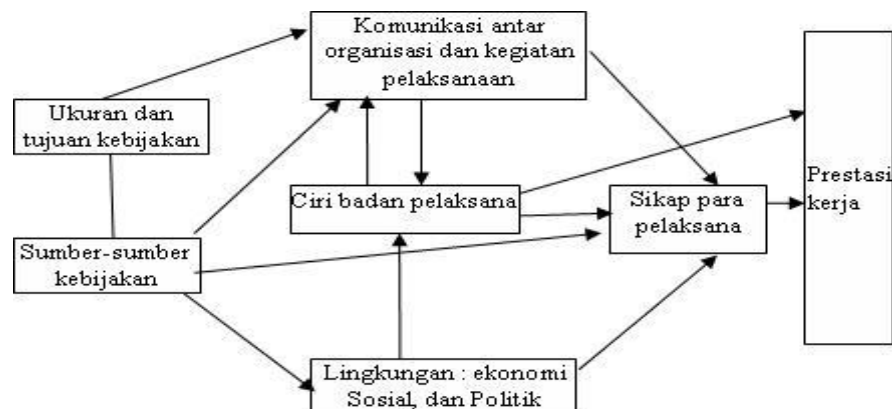
Kinerja kebijakan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk di antaranya:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan
6. kegiatan-kegiatan pelaksanaan ,Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Secara rinci faktor – faktor implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

---

<sup>6</sup> Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society*



*Gambar 1. model a policy implementation process*

Teori ini mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, termasuk isu-isu terkait sumber daya, institusi, tata kelola, dan faktor sosial lainnya. Tujuan utama teori implementasi adalah untuk membantu para pembuat kebijakan dan praktisi dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Salah satu teori implementasi yang terkenal adalah teori implementasi Van Meter dan Van Horn yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1975

## **2. Teori Peraturan Walikota Medan No 53 Tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi Kecamatan atau kelurahan.**

Dalam peraturan walikota Medan no 53 tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi Kecamatan atau kelurahan. pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagai dimaksud dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintahan daerah merupakan walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

### **3. Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli**

#### 3.1 Van Meter dan Van Horn

Implementasi kebijakan adalah "serangkaian tahapan dan proses yang kompleks yang melibatkan persepsi, interpretasi, komunikasi, alokasi sumber daya, struktur organisasi, reaksi pelaksana, dan konteks lingkungan."<sup>7</sup>

#### 3.2 Peter J. May

Implementasi kebijakan adalah "proses di mana keputusan dan tujuan kebijakan diubah menjadi tindakan nyata melalui interaksi antara pelaksana kebijakan, struktur organisasi, dan kondisi lingkungan."<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). "The policy implementation process: A conceptual framework." *Administration & Society*, 6(4), 445-488.

<sup>8</sup> May, P. J. (1992). "Policy implementation." *The International Encyclopedia of Public Policy and Administration*, 5, 261-267.

### 3.3 Sabatier dan Mazmanian

Implementasi kebijakan adalah "proses di mana organisasi dan individu mengubah kebijakan formal menjadi tindakan konkret dalam rangka mencapai tujuan kebijakan."<sup>9</sup>

#### **F. Kerangka Berpikir**

Dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan yang baik , maka untuk itu Kerangka Berpikir Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kecamatan Medan Tembung merupakan suatu struktur konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis peran, tanggung jawab, dan fungsi yang spesifik dilakukan oleh kecamatan Medan Tembung dalam konteks pemerintahan daerah Kota Medan.

Kerangka berpikir ini membantu dalam memahami bagaimana Tupoksi kecamatan Medan Tembung diimplementasikan dan memberikan panduan dalam analisis dan penilaian tupoksi tersebut. Kerangka berfikir membantu peneliti atau analisis kebijakan untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang topik yang diteliti, serta memandu penelitian atau analisis kebijakan agar lebih fokus dan terarah. Kerangka berfikir biasanya terdiri dari beberapa elemen, seperti latar belakang masalah, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, analisis data, dan kesimpulan.

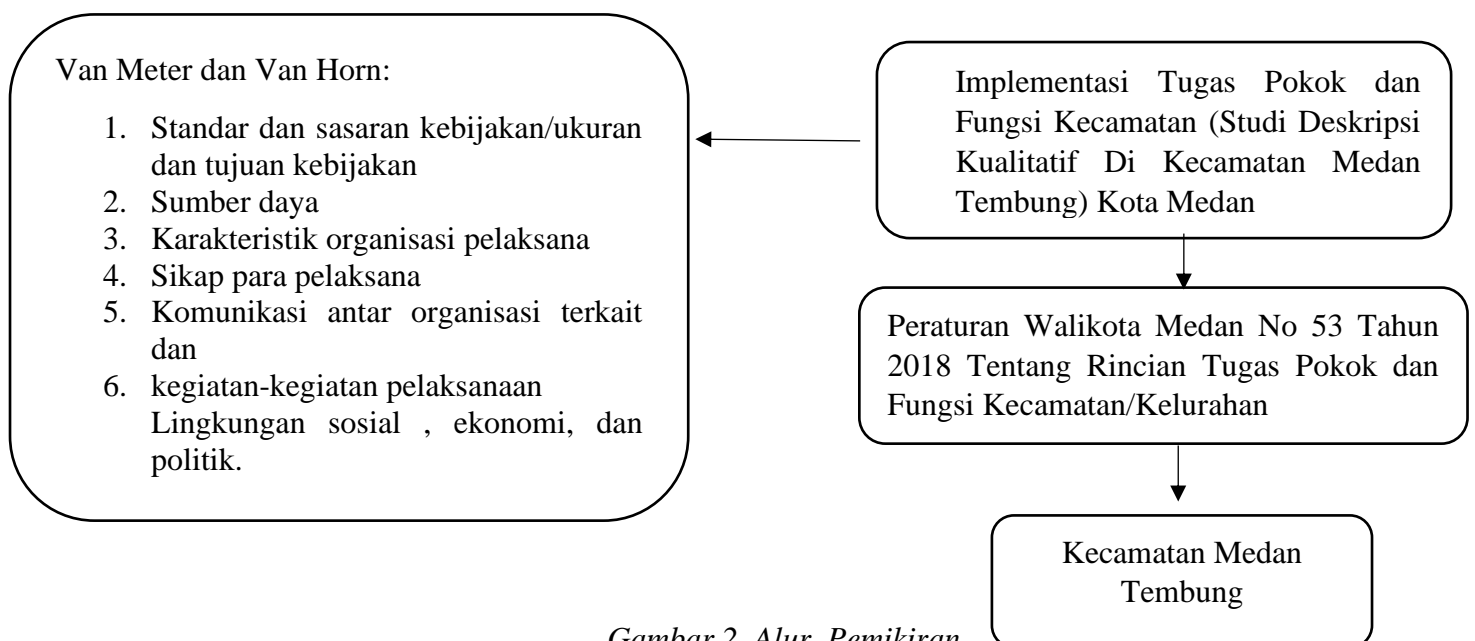
Menurut Creswell , kerangka pemikiran merupakan suatu kerangka yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan permasalahan

---

<sup>9</sup> Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). "Implementation and Public Policy." Scott, Foresman and Company.

penelitian dengan mengacu pada teori-teori, konsep-konsep, atau model-model yang relevan. Kerangka pemikiran dapat menjadi landasan bagi peneliti untuk merumuskan hipotesis atau tujuan penelitian serta membantu dalam menentukan metode penelitian yang tepat.<sup>10</sup>

### ALUR PIKIR



Gambar 2. Alur Pemikiran

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Maka, dalam meneliti Implementasi tugas pokok dan fungsi kecamatan (studi deskripsi kualitatif di kecamatan medan tembung). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Metode ini

<sup>10</sup> Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. yjhSage publications.

menekankan pada proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendalam, terperinci, dan sistematis terhadap informasi verbal atau nonverbal, tindakan, perilaku, dan situasi yang ditemukan di lapangan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara induktif dengan merumuskan hipotesis, konsep, atau teori yang berhubungan dengan data yang ditemukan di lapangan.

Menurut Miles dan Huberman (2014) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu cara untuk memahami fenomena yang kompleks dari sudut pandang partisipan dalam penelitian. Metode ini dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>11</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor camat , Kecamatan Medan Tembung yang beralamat Jl. Kapten M. Jamil Lubis No.107 , Kota Medan , Sumatera Utara , kode pos 20223.

## **3. Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, informan adalah sumber data yang memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Informan bisa berupa individu, kelompok, organisasi, ataupun komunitas yang terlibat dalam fenomena yang menjadi fokus penelitian. Informan dipilih berdasarkan karakteristik dan pengalaman mereka terkait dengan fenomena yang diteliti.

---

<sup>11</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.

Dalam pengambilan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan mampu memberikan informasi yang cukup dan relevan terhadap fenomena yang diteliti. Informan penelitian kualitatif adalah sumber data yang memberikan informasi dan wawasan tentang fenomena atau peristiwa yang menjadi fokus penelitian.

Menurut Miles dan Huberman Informan adalah orang-orang yang mengungkapkan atau menunjukkan pada peneliti apa yang diketahuinya tentang topik penelitian, baik secara langsung melalui wawancara atau observasi, maupun secara tidak langsung melalui rekaman atau dokumen.<sup>12</sup> Dalam informan penelitian ini pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, seperti kepala kecamatan, staf kecamatan, staf dinas terkait, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat.

Informan-informan tersebut dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dan komprehensif mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Selain itu, informan juga dapat memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan kinerja kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam pemilihan informan, perlu diperhatikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan yang cukup dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan sehingga dapat memberikan informasi yang valid dan bermanfaat.

---

<sup>12</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.

**Tabel 1.**  
**Informan**

No	Informan	Jumlah	Alasan
1	Camat atau Pemimpin Kecamatan	1	Sebagai Informan utama
2	Sekretaris Camat ( Sekcam)	1	Sebagai Informan Kunci
3	Pegawai/Masyarakat	1	Sebagai Informan Tambahan

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Miles dan Huberman , teknik pengumpulan data merupakan prosedur atau cara-cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian.<sup>13</sup>

Teknik-teknik tersebut dapat digunakan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif dan bervariasi tergantung pada tujuan penelitian dan sumber data yang akan diambil. Beberapa teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain :

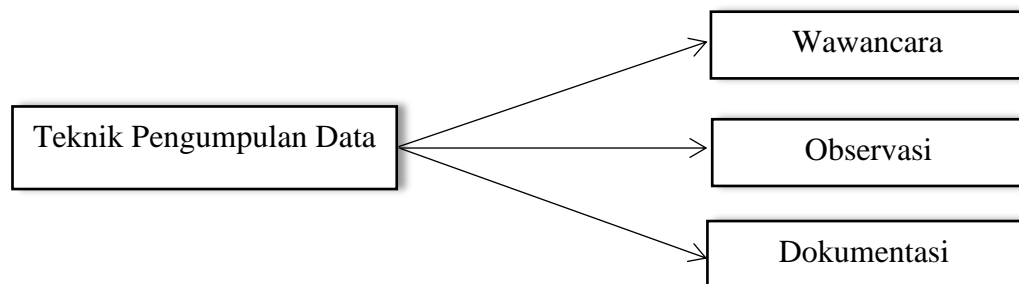
1. Observasi: melihat langsung dan mencatat kegiatan yang terjadi di tempat penelitian.

---

<sup>13</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.



2. Wawancara: tanya jawab antara peneliti dan informan untuk mendapatkan data mengenai pemahaman, pengalaman, sikap, atau pandangan informan terhadap topik penelitian.
3. Dokumentasi: pengumpulan data dari sumber tertulis atau dokumen, seperti buku, laporan, surat kabar, jurnal, atau arsip



*Gambar 3. Macam-macam Teknik Pengumpulan Data*

Teknik-teknik ini dapat digunakan secara terpisah atau digabungkan tergantung pada kebutuhan penelitian dan sumber data yang tersedia. Selain itu, teknik pengumpulan data kualitatif juga memerlukan kemampuan peneliti untuk menginterpretasi dan memahami data secara holistik dan konseptual.

## **5. Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari data , menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara , catatan lapangan dan dokumentasi. Selanjutnya akan dijelaskan teknik analisa data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini. Teknik analisa data yang digunakan peneliti pada penelitian adalah teknik analisa data secara kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai sumber informasi dan data yang kemudian

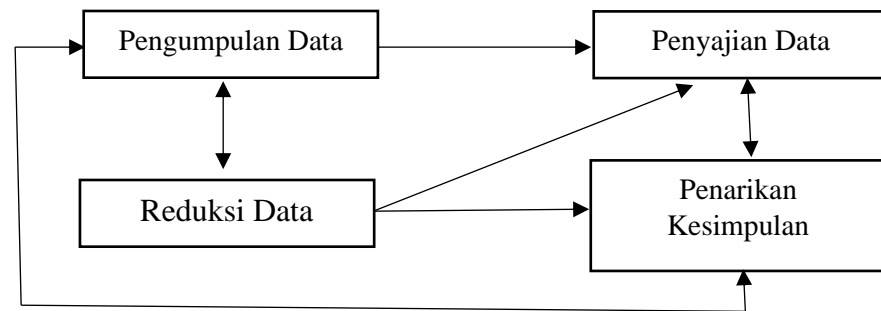
digeneralisasikan yakni dengan reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Analisis Data Menurut Miles dan Huberman, analisis dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- Reduksi data adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya peneliti bisa menyimpan mana data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu untuk penelitian. Dengan begitu data akan lebih sederhana dan jelas sehingga mudah ke tahap selanjutnya.
- Penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan lainnya. Tujuannya agar lebih mudah disampaikan dan dipahami oleh pihak lain. Ini juga akan memudahkan pembaca dalam menyerap informasi yang terdapat dalam data
- Penarikan kesimpulan atau conclusion drawing adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu. Kesimpulan dapat diletakkan paling akhir atau sebagai penutup sehingga pembaca dapat menemukan kesimpulan dari seluruh penelitian.

---

<sup>14</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.



*Gambar 4. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif*

Dalam penyajian data ini, data yang diperoleh akan diorganisir agar dapat memberikan deskripsi ke arah pengambilan kesimpulan. Tahap terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi data yang dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah.

Penarikan kesimpulan ini bermaksud pula untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang ada sehingga nantinya dapat ditemukan permasalahan apa yang ada dalam penelitian yang dilakukan dan dipertimbangkan lagi kepada berbagai pihak mengenai data-data yang diperoleh di lapangan.

## **H. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian.

maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

## 1. Bagian Awal

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan abstraksi.

## 2. Bagian Utama

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas Bab ini terdiri dari latar belakang masalah , perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka berpikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II URAIAN TEORI**

Bab II ini meliputi Landasan teori yang berisi tentang defenisi dan penjelasan tentang implementasi tugas pokok dan fungsi kecamatan.

### **BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Camat , Kecamatan Medan Tembung yang beralamat Jl. Kapten M. Jamil Lubis No.107 , Kota Medan , Sumatera Utara , kode pos 20223

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari teknik pengumpulan data.

#### **BAB V PENUTUP**

BAB terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan dalam hal ini menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ditemukan peneliti yang dinilai ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada BAB- BAB sebelumnya.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Implementasi**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>1</sup> Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan .tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah di putuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Pengertian implelementasi menurut KBBI (kamus besar indonesia ) adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Dalam kalimat lain implelementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa Undang – Undang, Peraturan

---

<sup>1</sup> Gaffar Afan, 2009 Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Cet. 1 Yogyakarta: Pusaka pelajar Hlm : 295

Pemerintah, Keputusan Peradilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.<sup>2</sup>

Menurut Mazmanian dan Sabatier , menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk pemerintah-pemerintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya<sup>3</sup>

Menurut Van Meter & Van Horn implemementasi ialah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk mencapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.<sup>4</sup> Menurut Prana Wastra dkk Impelementasi adalah sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana, kapan pelaksanaan, serta kapan diselesaikan target implementasi itu sendiri. Semua itu sudah direncanakan pada awal waktu.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Rulinawatiy Kasmad, *Impelementasi Kebijakan Publik*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018), hal.24.

<sup>3</sup> Apriandi, I.(2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa hlm.23 7(1),8-14

<sup>4</sup> Rulianawatiy kasmad, *Studi Impelementasi Kebijakan Publik*, ( Makassar:Kedai Aksara, 2013), hal 21.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

Di dalam dunia kebijakan publik, teori implementasi merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan publik diimplementasikan dalam praktik nyata. Salah satu teori implementasi yang sering dipakai adalah teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Teori ini dikembangkan oleh Charles E. Van Meter Jr. dan Carl E. Van Horn pada tahun 1975.<sup>6</sup>

Teori implementasi Van Meter dan Van Horn menyoroti peran penting dari faktor-faktor kontekstual dalam proses implementasi kebijakan. Mereka mengakui bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses yang kompleks dan terjadi di lingkungan yang serba dinamis. Teori ini mengidentifikasi beberapa elemen kunci yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, seperti karakteristik kebijakan, peran aktor yang terlibat, faktor lingkungan, dan proses komunikasi.

Salah satu aspek yang ditekankan oleh teori ini adalah pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai aktor dalam implementasi kebijakan. Teori ini mengakui bahwa kebijakan publik melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan dan peran yang berbeda. Oleh karena itu, kerjasama yang efektif dan komunikasi yang baik antara aktor-aktor ini menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, teori implementasi Van Meter dan Van Horn juga menekankan pentingnya evaluasi dalam proses implementasi kebijakan. Evaluasi berfungsi sebagai mekanisme untuk mengukur sejauh mana kebijakan telah diimplementasikan dengan baik, dan apakah tujuan

---

<sup>6</sup> Van Meter, C. E., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.



kebijakan telah tercapai. Dengan adanya evaluasi, kebijakan dapat ditingkatkan dan disesuaikan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam praktiknya, teori implementasi Van Meter dan Van Horn telah digunakan dalam berbagai studi implementasi kebijakan di berbagai bidang dan tingkatan pemerintahan. Teori ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, dan memberikan landasan untuk analisis yang lebih komprehensif tentang proses implementasi kebijakan.

## **2. Karakteristik Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan**

karakteristik implementasi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kecamatan adalah menjelaskan dengan jelas dan terperinci mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi pelaksanaan Tupoksi kecamatan. Berikut ini adalah penjelasan naratif yang baik tentang karakteristik implementasi Tupoksi kecamatan.

- a) Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kecamatan melibatkan sejumlah karakteristik yang khas dan penting. Pertama-tama, kecamatan memiliki peran multi-dimensi yang mencakup berbagai aspek tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Sebagai entitas pemerintahan daerah dengan tingkat otonomi tertentu, kecamatan bertanggung jawab atas pelayanan administratif, pelayanan masyarakat, pengawasan, dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.
- b) Selanjutnya, implementasi Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kecamatan melibatkan berbagai aktor yang terlibat dalam menjalankan

tugas dan fungsi tersebut. Para pejabat kecamatan, staf administrasi, petugas lapangan, masyarakat, kelompok masyarakat, dan lembaga lainnya bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri yang saling terkait dan mendukung.

- c) Koordinasi dan kolaborasi juga menjadi ciri khas implementasi Tupoksi kecamatan yang efektif. Kecamatan harus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti dinas pemerintah, kepolisian, lembaga sosial, dan lembaga lainnya, untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi yang baik memungkinkan kecamatan untuk mengintegrasikan upaya dan sumber daya dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga menciptakan sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan Tupoksi.
- d) Pelayanan publik menjadi fokus utama implementasi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kecamatan. Kecamatan harus menyediakan berbagai layanan administratif, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah kecamatan. Pelayanan yang berkualitas dan responsif adalah tujuan utama kecamatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
- e) Pengawasan dan akuntabilitas juga merupakan aspek penting dalam implementasi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kecamatan. Kecamatan harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi dengan memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kecamatan juga harus bertanggung jawab secara akuntabilitas terhadap masyarakat dan pemerintah daerah, dengan melaporkan hasil kinerja dan menggunakan sumber daya dengan efisien.

Dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik tersebut, kecamatan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan Tupoksi mereka. Pemahaman yang baik tentang karakteristik implementasi Tupoksi kecamatan membantu menciptakan kerangka kerja yang solid dan berkelanjutan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di wilayah kecamatan tersebut.

Karakteristik implementasi tugas pokok dan fungsi kecamatan mengacu pada atribut atau ciri-ciri yang mendefinisikan bagaimana kecamatan menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik, pembangunan, koordinasi, dan tata kelola di tingkat lokal. Karakteristik ini menggambarkan bagaimana kecamatan berinteraksi dengan masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan serta pelayanan di wilayahnya. Karakteristik-karakteristik ini membentuk identitas dan peran kecamatan dalam implementasi tugas pokok dan fungsi mereka. Peran kecamatan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan, budaya, dan konteks geografis suatu daerah.